

Kebijakan Luar Negeri Jepang dalam Upaya Konstruksi Program Sanitasi Internasional

Andin Shifa Nurhidayatika

andinshifa97@gmail.com

Pembimbing : Ratih Herningtyas, S.IP., M.A.

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Telp : (0274) 387656

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan alasan Jepang aktif berperan di dalam masalah-masalah sanitasi internasional. Dengan menggunakan teori konstruktivisme mengenai persebaran norma atau *Norm of Life Cycle*, penelitian ini menemukan bahwa alasan Jepang aktif berperan di dalam masalah sanitasi internasional melalui *Official Development Assistancenya* adalah didasari oleh keinginannya untuk membangun konstruksi internasional sebagai negara pelopor sistem sanitasi yang baik dan untuk menyebarluaskan norma negaranya melalui sistem sanitasi yang baik tersebut. Terdapat peran penting pemerintah Jepang sebagai *Norm Entrepreneur* di dalam proses persebaran norma ini, sehingga norma sanitasi yang awalnya hanya menjadi isu domestik Jepang kini telah menjadi sebuah legitimasi internasional dibuktikan dengan terbentuknya *UN Human Rights to Water and Sanitation*.

Kata kunci: Jepang, Sanitasi, *Official Development Assistance*, *Norm of ife Cycle*.

Latar Belakang Masalah

Jepang merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Timur. Negara ini berbentuk negara kepulauan dengan 6.852 pulau besar maupun kecil (Shindo, 2015). Saat ini, Jepang merupakan negara yang menduduki urutan ketiga sebagai negara dengan ekonomi terbesar setelah Amerika Serikat dan China (Tiongkok). Pendapatan Domestik Bruto atau PDB Nominal Jepang adalah US\$ 5,443 triliun dengan Pendapatan Per Kapita sebesar US\$42.900 (Saragih, 2018).

Meskipun Jepang kini telah dikenal sebagai salah satu negara yang berpengaruh di dunia dengan perkembangan ekonomi yang stabil dan signifikan, sejarah mencatat bahwa Jepang pernah mengalami masa suram pada akhir abad ke-20 dimana saat itu Jepang mengalami kekalahan pada

perang dunia ke-2 yang ditandai dengan pengeboman dua kota penting di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat yang mana kejadian ini menciptakan perubahan besar bagi dunia. Meskipun sempat mengalami keterpurukan dimasa lalu, Jepang berhasil membuktikan bahwa negaranya mampu bangkit dari keterpurukan dalam waktu yang cukup singkat.

Kini eksistensi Jepang sebagai negara yang maju di bidang pengembangan teknologi dan industri tidak diragukan lagi, kemajuan teknologi dan industry yang dimiliki Jepang memberikan pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara ini, sehingga negara yang dulunya hancur karena kekalahan perang dunia kedua kini menjadi salah satu negara maju dengan

pendapatan tertinggi di dunia (high-income country). Pengembangan teknologi sangat penting sebagai salah satu elemen era globalisasi dan peningkatan daya saing. Selain itu, kemajuan teknologi suatu negara merupakan cerminan dari peningkatan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Salah satu bukti kemajuan teknologi yang dimiliki Jepang adalah dalam pengembangan sistem sanitasi, Jepang telah mencapai akses universal terhadap penyediaan air dan sanitasi, bahkan Jepang merupakan negara dengan tingkat kerugian distribusi air terendah di dunia karena negara ini memiliki standar yang ketat terhadap kualitas air minum dan air limbah dengan menggunakan sistem nasional yang efektif untuk utilitas air dan sanitasi, pengembangan sanitasi di Jepang merupakan perpaduan antara teknologi canggih dan teknologi yang tepat. (advanced and appropriate technologies) (International Water Association, 2018).

Sanitasi mencakup segala hal yang berhubungan dengan usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat; atau dalam kata lain sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.). Dari definisi sanitasi tersebut terdapat satu tujuan yang ingin dicapai yaitu menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, tujuan tersebut dicapai melalui usaha untuk merawat segala elemen di muka bumi yaitu tanah, air dan udara.

Jepang sendiri dalam pengelolaan air telah menggunakan teknologi pipa stainless steel, penggunaan stainless steel ini berhasil mengurangi tingkat kerugian air karena bahan pipa yang

terbuat dari stainless steel beresiko rendah terhadap kebocoran. Teknologi filterisasi air yang dikembangkan Jepang juga sangat canggih dengan menggunakan karbon aktif (Ministry of Health, Labour and Welfare, 2019).

Selain berfokus pada pengelolaan sanitasi di negaranya, Jepang juga memiliki concern yang tinggi terhadap pengelolaan sanitasi secara global, Jepang merupakan pendonor terbesar di dunia dalam sektor air dan sanitasi dan telah memberikan bantuan berupa pengalaman, pengetahuan dan teknologi terkait pengelolaan sanitasi yang dimilikinya. Jepang tercatat memiliki berbagai kerjasama dibidang sanitasi dan membentuk berbagai forum terbaik sanitasi diantaranya adalah WASABI atau Water and Sanitation Broad Partnership Initiative pada tahun 2006 dan pada tahun 2002 membentuk kerjasama dengan Amerika Serikat bernama United States-Japan Clean Water for People Initiative. Selain itu Jepang juga pernah menjadi tuan rumah untuk Third World Water Forum pada tahun 2003, mendukung dan memastikan dilaksanakannya resolusi pada International Year of Sanitation 2008 di United Nation General Assembly pada tahun 2007 dan berkomitmen untuk mensupport kerjasama multilateral dalam hal sanitasi (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2014) dan baru-baru ini pada tahun 2018 Jepang menjadi tuan rumah IWA World Water Congress & Exhibition 2018 yang dilaksanakan di kota Tokyo (International Water Association, 2018).

Selain itu, Jepang juga banyak membantu masalah terkait sanitasi diberbagai negara, salah satunya adalah India, negara ini termasuk dalam negara poor sanitation country, menurut data dari World Bank memperkirakan bahwa 21 persen penyakit menular di India disebabkan oleh air yang tidak

bersih dan kurangnya praktik kebersihan. Lebih dari 500 anak di bawah usia lima tahun setiap hari terkena diare di India (India's Water and Sanitation Crisis, n.d.). Jepang melalui JICA (Japan International Cooperation Agency) sebuah agensi pemerintah yang mengurus official development assistance (ODA) memberikan bantuan kepada India berupa pendampingan dalam pembangunan fasilitas sanitasi seperti toilet umum, lebih dari 1.500 toilet umum dibangun untuk mengurangi kebiasaan buang air sembarangan di India (Sakamoto, Japan-India Friendship: Activities of JICA in India, 2018).

Kebijakan luar negeri Jepang berupa bantuan dalam bidang sanitasi untuk beberapa negara ini menunjukkan bahwa Jepang menaruh perhatian yang besar dalam bidang ini, yang mana hal ini sangat jarang dilakukan oleh negara lain. Isu sanitasi terbilang isu yang tidak terlalu populer bagi negara lain, namun Jepang justru memiliki antusiasme yang sangat besar dalam isu ini.

Sebenarnya, dalam hubungan internasional persoalan mengenai sanitasi bukanlah persoalan kecil, ini adalah hal yang sangat penting bagi pengembangan negara modern, baik atau buruknya pengembangan sanitasi sangat berdampak pada pembangunan suatu negara karena kebutuhan akan pengelolaan sanitasi yang baik merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Masalah sanitasi bahkan menjadi salah satu dari 17 poin SDGs (Sustainable Development Goals) yaitu poin nomor 6 yang berbunyi “memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan”, dari poin ke enam ini salah satu target yang ingin dicapai pada tahun 2030 adalah “mencapai akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuk semua, dan mengakhiri buang air besar

sembarangan (BABS)” (Indonesia, 2015).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengambil rumusan masalah: “Mengapa Jepang aktif berperan didalam masalah sanitasi internasional?”

Kerangka Pemikiran (Konstruktivisme)

Konstruktivisme merupakan salah satu bagian dari teori post-positivisme, pemikiran utama para kaum post-positivisme adalah bahwa dalam mengamati ilmu sosial adalah tidak mungkin jika tidak melibatkan si pembuat teori didalamnya, artinya adalah akan selalu ada subjektivitas si pembuat teori dalam teori yang ia ciptakan, berbeda dengan pendekatan positivisme yang objektif. Pendapat kaum post-positivisme tentang subjektivitas ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Robert Cox “*There is not theory itself: theory is always for someone, some purposes. There is no neutral theory concerning human affairs, no theory of universal validity. Theory derives from practice and experiences, and experience is related to time and place. Theory is a part of history.*” (Alexander Wendt J. S., 2014)

Munculnya teori-teori baru seperti feminisme, konstruktivisme dan *English school* merupakan bentuk pemberontakan kaum post-positivisme terhadap kaum positivisme. Richard Rorty seorang ahli filsafat mengatakan adanya semacam revolusi filosofi dalam bentuk pembelokan linguistik (*the linguistic turn*) yaitu perhatian HI yang dulunya berfokus pada konsep-konsep dan ide-ide universal ke kata-kata dan simbol-simbol linguistik yang dianggap lebih mewakili konteks lokal (Hadiwinata, 2017)

Dalam konstruktivisme, dunia sosial adalah merupakan sesuatu yang dikonstruksi oleh manusia. Jadi, dunia

sosial bukanlah sesuatu yang *given* seperti yang digambarkan oleh kaum positivis melainkan dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif artinya adalah masyarakat berperan penting didalam dunia sosial karena masyarakatlah yang memaknai dunia sosial tersebut karenanya kaum konstruktivisme menekankan pada peran pemikiran, pengetahuan bersama atas dunia sosial (Robert Jackson, 1999). Jadi, kaum konstruktivisme memandang dunia sosial sebagai sesuatu yang sedang diciptakan atau sebagai suatu proses melahirkan sesuatu bukan sesuatu yang telah ada atau “terberi”, sehingga pembentukan identitas adalah sangat penting dan dinamis dalam mengkonstruksi dunia sosial.

Nicholas Onuf menawarkan satu paradigma baru yang memperhatikan karakter politik dan batas-batas tradisional, ia memahami bahwa konstruktivisme merupakan asumsi bahwa orang atau masyarakat itu mengkonstruksi atau menyatakan satu sama lain atau dalam kata lain konstruktivisme adalah berdasarkan pada kelakuan baik tindakan fisik maupun ucapan kata-kata (Alexander Wendt E. O., 2000).

Menurut Friedrich Kratochwil di dalam karyanya yang berjudul *Rules, Norms, and Decision; On the Condition of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs*. Berpendapat bahwa konstruksi hidup bersama dalam komunitas internasional adalah sebuah “proses pembelajaran” (*learning process*) interaksi antar subjek yang dibentuk oleh identitas (*identity*), kepentingan (*interest*), nilai-nilai (*values*) dan maksud (*intention*) yang membentuk dan menentukan pola-pola hubungan tertentu sebagai “sahabat” (*friends*) atau “musuh” (*enemy*). Jadi, berbeda dengan pendekatan-pendekatan positivisme yang percaya bahwa hubungan antar-bangsa terjalin karena untuk mencapai kepentingan semata, konstruktivisme memahami

hubungan antar-bangsa sebagai sesuatu yang lebih kompleks dan didasari oleh unsur lain seperti norma, identitas, intensi dan Bahasa (Friedrich, 1989).

Dalam konstruktivisme, norma memiliki peran yang sangat penting karena norma menentukan bagaimana negara seharusnya bertindak dalam isu tertentu. Bagi kaum konstruktivisme norma merupakan “harapan-harapan bersama yang dianut oleh sekelompok aktor mengenai perilaku yang pantas” (Finemore, 1996). Dalam interaksi hubungan internasional, negara melakukan suatu tindakan karena mereka dituntut oleh aturan-aturan, prinsip-prinsip, norma-norma yang disepakati bersama. Dalam kata lain, norma adalah segala sesuatu yang dianggap pantas oleh komunitas internasional yang akhirnya mendorong setiap negara untuk melaksanakannya (Rosyidin, 2015).

Norma dan gagasan yang terlembaga bersifat rasional karena keduanya memiliki kekuatan moral dan konteks sosial. Pelembagaan norma sendiri dibagi menjadi dua yaitu di tingkat internasional (norma struktural) maupun tingkat nasional (norma domestik). Norma struktural adalah tatanan nilai dan kaidah yang dikonstruksikan oleh aktor-aktor internasional yang kemudian memaksa aktor-aktor tersebut berperilaku sesuai dengan standar moralitas yang telah dikonstruksikan tersebut, sementara norma domestik adalah merupakan nilai-nilai tertentu yang dianut oleh suatu negara. Jadi, perbedaan antar keduanya terletak pada ruang lingkungannya dan siapa yang menciptakan norma (Rosyidin, 2015).

Pandangan berbeda mengenai norma datang dari kaum tradisional, mereka menekankan pada sifat negara yang rasional atau yang selalu mempertimbangan untung-rugi sehingga negara selalu diidentikan dengan egoisme, maka dalam memaknai norma kaum realis-liberal menganggap norma adalah “alat”

kepentingan nasional, karenanya kaum realis-liberal memandang norma tidak lebih dari sekedar medium bagi aktor untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara bagi kaum konstruktivisme, negara merupakan sebuah entitas sosial. Negara bertindak bukan berdasarkan rasionalisme (untung-rugi) melainkan berdasarkan pertimbangan mengenai sesuatu yang dianggap baik atau buruk, jadi norma bukan dianggap sebagai alat kepentingan negara. Negara menjadi taat aturan (norma) karena ada struktur sosial yang menekankan negara untuk mengikuti aturan yang telah disepakati bersama (Rosyidin, 2015, pp. 74-75).

Kemudian, norma seringkali dikaitkan dengan identitas karena pada dasarnya keduanya memang tidak dapat dipisahkan, norma merupakan unsur yang membentuk identitas karena norma berperan sebagai pembentuk jati diri aktor dalam konteks sosial tertentu. Menurut Naomi Ellemers dalam bukunya yang berjudul *Self and Social Identity*, konsep identitas dapat dipahami sebagai atribut atau karakteristik yang membedakannya dengan yang lain. Jadi, identitas adalah sesuatu yang terkonstruksi di dalam proses interaksi dengan pihak lain karenanya dibutuhkan intersubjektivitas untuk memaknai identitas tersebut (Naomi Ellemers, 2002).

	Tipping Point		
	Stage 1 Norm Emergence	Stage 2 Norm Cascade	Stage 3 Internalization
Actors	Norm entrepreneurs with organizational platforms	States, international organizations, networks	Law, professions, bureaucracy
Motives	Altruism, empathy, ideological commitment	Legitimacy, reputation, esteem	Conformity
Dominant mechanism	Persuasion	Socialization, institutionalization, demonstration	Habit, institutionalization

Source: Finnemore and Sikkink (1998, 898).

Gambar 1: Norm of Life Cycle

Finnemore dan Sikkink menjelaskan bagaimana dan mengapa norma internasional tertentu berhasil dipromosikan, disebarkan, dan diadopsi oleh negara di komunitas internasional. Dalam upaya mereka untuk mengkonseptualisasikan munculnya norma baru, Finnemore dan Sikkink Menggambar pada wawasan yang diperoleh dari teori hukum

Amerika Serikat, kelembagaan sosiologi dan teori hubungan internasional. Berkenaan dengan teori hukum, mereka menunjukkan bahwa, di ranah internasional, proses serupa untuk proses domestik sedang bekerja ketika norma baru muncul. Finnemore dan Sikkink berpendapat bahwa norma terbentuk dan berevolusi dalam tahap norma siklus hidup (*stage of norm life cycle*) (Thomas Risse, 1999).

Didalam *stage of norm life cycle* Finnemore dan Sikkink membedakan tiga tahapan: pertama *Norm Emergence*, di mana pelaku utama adalah seorang *norm entrepreneur*; kedua, *tipping point* diikuti oleh *norm cascade* atau mengalirnya norma dan norma telah diterima secara luas oleh negara; dan ketiga, *norm internalization* yaitu dimana norma telah terspesifikasi dalam dokumen hukum atau perjanjian bilateral. Finnemore dan Sikkink berpendapat bahwa dampak domestik sangat penting selama fase pertama.

Peran yang dilakukan Jepang dalam kebijakan luar negerinya berupa bantuan terhadap masalah-masalah terkait sanitasi di berbagai negara merupakan usaha untuk membangun sebuah konstruksi internasional tentang identitas negaranya. Masalah sanitasi bagi negara lain mungkin bukan isu yang terlalu diperhatikan, namun sebaliknya, Jepang memiliki antusiasme yang tinggi terhadap isu ini dan menjadikan ini sebagai sesuatu yang mencerminkan negaranya atau sebagai *identity* negaranya. Jepang berusaha untuk menawarkan ide-ide, norma dan *values* yang dipegang negaranya melalui sistem sanitasinya yang baik dan toilet umum yang bersih dan canggih.

Peran serta Jepang dalam berbagai forum terkait sanitasi dan bantuan yang diberikan Jepang kepada berbagai negara mungkin tidak menguntungkan dari segi ekonomi, namun seperti yang dikatakan kaum konstruktivisme bahwa negara bukan

aktor yang selalu mengedepankan rasionalisme atau untung-rugi, tindakan yang dilakukan Jepang memang tidak menguntungkan tapi ada suatu hal yang lebih kompleks yang ingin dicapai oleh Jepang yaitu pembangunan identitas melalui penyebaran norma yang dipegang oleh negaranya yang diharapkan dapat diadopsi oleh negara lain dan menjadi norma bersama.

Pentingnya pengelolaan sanitasi di suatu negara sangat erat kaitannya dengan budaya yang menunjukkan karakter sebuah negara. Misalnya, kondisi toilet umum yang berada di suatu kota atau negara dengan keadaan yang sangat buruk dan tidak terawat secara tidak langsung menunjukkan kebiasaan masyarakatnya yang “jorok”, tidak peduli terhadap kebersihan dan kesehatan serta kurang bertanggung jawab terhadap kebersihan fasilitas publik. Secara lebih luas, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap citra suatu negara bagi persepsi masyarakat internasional. Jepang telah berhasil membangun citra negaranya sebagai negara yang baik dalam sistem sanitasi melalui kebersihan toilet umum serta kecanggihan pengelolaan air dan limbah. Kini Jepang membawa nilai-nilai dan norma tersebut ketaraf internasional dengan berusaha berperan dalam masalah terkait sanitasi diberbagai negara, yang mana diharapkan hal ini akan menjadi suatu *sharing identity*. Melalui sistem sanitasi terdapat suatu hal yang lebih besar yang hendak Jepang tawar yaitu tentang standar sanitasi yang baik adalah yang sesuai dengan standar Jepang, terdapat nilai-nilai mengenai budaya, norma dan kebiasaan orang Jepang didalamnya yang hendak Jepang sampaikan pada dunia.

Hasil Penelitian

1. Analisa Pemerintah Jepang sebagai *Norm Entrepreneur*

Selama kurang lebih dua puluh tahun terakhir, para pemikir Hubungan Internasional telah mempelajari bagaimana ide-ide tertentu bisa berubah menjadi norma yang membawa perubahan dalam perilaku negara dan aktor lain dalam politik internasional. Mereka berpendapat bahwa konstruksi normatif intersubjektif mempengaruhi bagaimana kepentingan nasional dan internasional didefinisikan dan dicapai. Karena itu, kepentingan-kepentingan ini tidak dapat dilihat hanya sebagai turunan dari kekuatan struktural yang dimiliki oleh negara-negara dominan. Sebaliknya, kepentingan dibentuk oleh proses yang dinamis melalui proses suatu norma yang muncul dan terus berkembang (Krook, 2012).

Perubahan sifat atau perilaku suatu negara di dalam Hubungan Internasional biasanya dipengaruhi oleh aktor non-negara yang menciptakan norma-norma tertentu dan kemudian membujuk negara untuk mengubah perilakunya sesuai norma yang mereka percayai, namun kaum konstruktivisme mempercayai bahwa negara juga dapat bertindak sebagai apa yang disebut dengan *norm entrepreneur*. Berbeda dengan aktor non-negara yang merubah perilaku negara dengan menggunakan cara mengadvokasi norma baru, para pemimpin kebijakan luar negeri memanfaatkan identitas yang telah melekat pada negaranya untuk mendapat pengakuan dan untuk melakukan persebaran norma dalam bingkai kebijakan nasional (Sara E. Davies, 2017).

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi pemerintah Jepang sebagai *norm entrepreneur*. *Norm entrepreneur* adalah sebutan untuk seseorang atau sekelompok orang yang tertarik untuk mengubah norma sosial. Cass Sunstein menciptakan istilah di dalam tulisannya pada tahun 1996 yang berjudul *Social Norms and Social Roles*. Sunstein mengidentifikasi kategori orang atau kelompok yang ia sebut sebagai “pengusaha norma” yang tertarik dalam mengubah norma sosial. Jika mereka berhasil dalam usaha mereka, maka mereka dapat menghasilkan apa yang ia sebut sebagai *norms bandwagons* dan *norms cascades* yang mengarah ke perubahan besar dalam norma sosial (Sunstein, 1996).

Dalam isu tentang sanitasi, Pemerintah Jepang merupakan *norm entrepreneur* yang berusaha menjual norma tentang keberadaban bangsa Jepang yang dicerminkan melalui kecanggihan sistem sanitasi negaranya. Dibalik bantuan program sanitasi internasional yang diberikan, pemerintah Jepang secara tidak langsung sedang berusaha untuk memasukan nilai dan norma yang dipercayai oleh bangsa Jepang melalui bantuan program sanitasi tersebut.

Terbukti dengan berbagai usaha yang dilakukan pemerintah Jepang yang dimulai dengan pembangunan norma domestik dalam bidang sanitasi yaitu norma tentang kebersihan, higienitas dan hak asasi manusia, proses pembangunan norma ini memerlukan usaha yang panjang, pemerintah Jepang berusaha untuk meyakinkan rakyatnya bahwa sanitasi merupakan bagian penting di dalam kehidupan, ketika norma domestik telah terbentuk, pemerintah Jepang

berusaha menjual norma tersebut ke taraf internasional melalui perannya di dalam masalah sanitasi Internasional di berbagai negara.

Negara penerima bantuan Jepang dalam bidang sanitasi merupakan negara yang masuk dalam kategori “*poor sanitation country*” yang mana negara-negara ini kesulitan untuk mewujudkan sistem sanitasi yang baik di negaranya karena berbagai alasan seperti alasan ilmu pengetahuan, ekonomi dan geografis, karenanya negara-negara ini memerlukan bantuan dari Jepang sebagai negara yang ahli didalam bidang ini. ODA Jepang yang disalurkan kepada negara *poor sanitation* menjadi media bagi Jepang untuk mempromosikan pentingnya sanitasi, bantuan-bantuan yang diberikan Jepang memiliki syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan standarisasi sanitasi Jepang. Adapun standar sistem sanitasi yang diberikan Jepang kepada beberapa negara *poor sanitation* dalam hal ini India, Indonesia dan Afrika, seluruhnya menggambarkan tentang moderinatas, efisientas dan kecanggihan teknologi yang dianut Jepang. Selain itu, Jepang juga memastikan bahwa bantuan kepada ketiga negara ini mencerminkan norma negaranya.

Pada bantuan instalasi toilet umum sebanyak 1.5000 buah di India yang bertujuan untuk merubah kebiasaan orang India yang masih terbiasa buang air besar secara terbuka, Jepang menyadari perubahan perilaku buruk ini tidak bisa dilakukan hanya dengan memberikan fasilitas, namun perlunya dilakukan perubahan moral dan perilaku terlebih dahulu, karenanya Jepang memberikan pelajaran mengenai kebersihan dan higienitas kepada masyarakat India

disamping juga memberikan bantuan berupa fasilitas toilet hal ini dilakukan guna merubah perilaku buruk masyarakat India dan untuk memasukan norma baru yang dimiliki Jepang dalam hal kebiasaan dan budaya sanitasi.

Sama halnya dengan bantuan di India, bantuan instalasi toilet Jepang di Sinegal dimulai dengan merubah moral dan perilaku masyarakatnya, Jepang dalam proyek ini mengadopsi CLTS atau *Community-led total sanitation* yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan praktik sanitasi dan kebersihan yang baik. CLTS berfokus pada perubahan perilaku yang berkesinambungan pada suatu komunitas. Tujuan dari CLTS adalah untuk mengakhiri buang air besar secara terbuka dengan cara melakukan pengajaran dan pengawasan pada tindakan yang mengarah pada peningkatan harga diri seseorang serta menciptakan rasa malu tentang perilaku buang air terbuka. Alasan Jepang mengadopsi CLTS pada proyeknya di Sinegal karena kebiasaan masyarakat Sinegal yang tidak merawat fasilitas toilet yang telah diberikan, sehingga bantuan toilet terkesan tidak bermanfaat karena minimnya tingkat kesadaran masyarakatnya tentang kebersihan dan higienitas (Vidya Venkataramanan, 2018).

Kemudian, bantuan Jepang kepada negara Poor Sanitation ini juga menunjukkan norma HAM yang dianut Jepang dalam bidang sanitasi. Menurut laporan UN *Special Rapporteur on the Human Right to Water and Sanitation* akses pada sanitasi khususnya air dan toilet di Jepang mengedepankan pada asas hak asasi manusia. Akses air dan toilet dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat di

Jepang tanpa memandang ras, kasta, jenis kelamin dan usia. Berdasarkan hasil wawancara UN *Special Rapporteur on the Human Right to Water and Sanitation* dengan tunawisma yang tinggal di taman di Tokyo dan Osaka, mereka memiliki akses terhadap air dan toilet melalui fasilitas umum, hal ini bisa dibilang sangat lebih baik dibandingkan dengan negara lain dalam hal menegakan prinsip non-diskriminasi terhadap lapisan masyarakat tertentu. Terdapat nilai tentang pentingnya mengedepankan hak asasi bagi setiap umat manusia terlepas dari lapisan mana mereka berasal. Akses air dan toilet bagi lapisan masyarakat terbawah di beberapa negara mungkin menjadi hal yang sangat langka, namun sebaliknya di Jepang air dan toilet menjadi hak seluruh warga negaranya (Center, n.d.).

Dengan bantuan yang diberikan Jepang kepada berbagai negara, menunjukkan bahwa Jepang sangat mengedepankan prinsip HAM yaitu non-diskriminasi, sanitasi menjadi hak mendasar setiap manusia terlepas dari ras dan negara mana seseorang berasal karenanya Jepang mengusahakan tersedianya akses sanitasi yang baik bagi masyarakat di berbagai negara.

Jadi, bantuan Jepang dalam bidang sanitasi bukan hanya bantuan yang berbentuk materiil, melainkan terdapat misi besar dibaliknya, yaitu misi untuk merubah budaya dan moral yang buruk yang masih dipraktikkan oleh negara-negara tersebut dan menggantinya menjadi norma yang sesuai dengan standar Jepang. Serta Jepang ingin menunjukkan bahwa sanitasi sangat erat kaitannya dengan HAM.

2. Upaya Jepang dalam Mengkonstruksi Norma Sanitasi Internasional

a.) 1st Stage: Norm Emergence

Pada *stage* ini dikarakteristikan sebagai tahap untuk meyakinkan dan mempengaruhi. *Norm entrepreneur* bekerja untuk mempengaruhi masa agar mengadopsi norma baru melalui *organitazion platform* tertentu. Pada *stage* ini pemerintah Jepang sebagai *norm entrepreneur* berusaha untuk mempengaruhi dan meyakinkan masa internasional bahwa sanitasi merupakan isu yang penting untuk dibahas, usaha yang dilakukan pemerintah Jepang adalah dengan aktif menciptakan kerjasama maupun menyelenggarakan *summit* yang berhubungan dengan sanitasi.

Diantaranya adalah pada tahun 2002 Jepang membentuk *Japan-United State Clean Water for People Initiative*. Kerjasama ini merupakan sebuah usaha bersama untuk menyediakan air yang bersih dan sanitasi yang baik bagi masyarakat miskin di dunia, serta meningkatkan manajemen dan produktivitas air. Kerjasama ini dibuat dalam konteks kemitraan untuk keamanan dan kemakmuran yang diumumkan pada bulan Juni 2002 oleh Presiden Bush dan Perdana Menteri Koizumi (Development, 2003)

Kemudian, pada tahun 2006 di *World Water Forum* yang diadakan di Mexico, Jepang mengumumkan WASABI (*Water and Sanitation Broad Partnership Initiative*). Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional, negara pendonor lain, LSM domestik dan luar negeri serta pihak lain yang berkaitan dengan air dan sanitasi, untuk meningkatkan kualitas bantuan di bidang air dan sanitasi.

Di bawah WASABI, Jepang berkomitmen akan memperkuat kontribusinya didalam masalah terkait air dan sanitasi. WASABI menekankan pada tiga pendekatan: .

1.) Keberlanjutan Penggunaan Air

Jepang secara historis telah menangani masalah yang berkaitan dengan air seperti banjir, kekeringan dan polusi air. Berdasarkan pengalamannya, Jepang ingin mempromosikan pentingnya keberlanjutan penggunaan air. Di tingkat kebijakan, Jepang akan memberikan dukungan kepada perumusan *integrated water resources management* (IWRM). Contohnya, di Indonesia, Jepang telah memanfaatkan pengalaman, keahlian dan teknologinya untuk mendukung proyek IWRM di cekungan sungai Brantas melalui sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur. Jepang juga akan mempromosikan keberlanjutan infrastruktur air melalui dukungan untuk pemeliharaan, manajemen dan operasi.

2.) Keamanan Manusia

Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang baik, pendekatan keamanan manusia, yang berusaha memberdayakan masyarakat setempat sebagai "promotor pembangunan" dan melindungi mereka dari ancaman seperti kurangnya akses, polusi air, dan bencana alam. Jepang akan menggabungkan perspektif

keamanan manusia dalam kegiatan ODAny.

3.) Kemitraan yang Luas

Jepang akan melakukan upaya untuk memperluas kemitraan dengan organisasi internasional, negara donor lainnya, pemerintah daerah, LSM, dll. Sehingga akan meningkatkan kualitas bantuan Sebagai contoh, *AS-Japan Clean Air for People Initiative* telah berkontribusi secara signifikan untuk menyediakan air dan sanitasi yang aman bagi masyarakat miskin di dunia (Japan announces a new ODA Initiative: "Water and Sanitation Broad Partnership Initiative" (WASABI), n.d.).

Pada tahun 2008 Jepang menyelenggarakan summit yang bernama *G8 Experts Group Meeting on Water and Sanitation*, yang mana *output* dari pertemuan ini adalah Jepang akan berfokus untuk membantu negara Sub-Sahara dan Asia-Pasifik didalam masalah terkait sanitasi dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang dimilikinya didalam bidang sanitasi (Japan, 2008).

Pada tahun selanjutnya yaitu 2009, Jepang meluncurkan *Japan Sanitation Consortium* (JSC). JSC adalah sebuahn organisasi unik yang terdiri dari organisasi dan lembaga yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang komprehensif dalam pembuatan kebijakan, manajemen sistem, operasi dan pemeliharaan sanitasi.

JSC bekerja sama dengan para profesional, kementerian, organisasi dan LSM, seperti *Japan Water forum*, *Japan Institute of Wastewater Technology*, PBB, UNICEF, dsb. Selain itu JSC secara aktif berkolaborasi

dengan organisasi donor internasional, seperti *Asian Development Bank* (ADB) dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) serta organisasi lokal.

Tujuan JSC adalah untuk mendukung negara kawasan Asia-Pasifik dengan akses rendah terhadap sanitasi dan untuk memungkinkan mereka memperoleh pengetahuan dan kapasitas untuk mengembangkan fasilitas sanitasi berkelanjutan serta untuk peningkatan kesehatan dan pengurangan polusi air. JSC menawarkan solusi kepada masing-masing negara dan strategi manajemen untuk mengatasi masalah sanitasi mereka, termasuk penyediaan matriks untuk pemilihan teknologi yang tepat agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Selain itu, untuk mempromosikan pengembangan kebijakan, kemampuan dan investasi untuk sanitasi, JSC bercita-cita untuk mengkonsolidasikan, menyebarluaskan dan berbagi pengetahuan serta informasi melalui kerjasama yang aktif dengan pemerintah Jepang, donor internasional negara di kawasan Asia Pasifik (*Japan Snitation Consortium*, n.d.).

Dari berbagai bentuk kerjasama yang diciptakan Jepang, terdapat suatu pola yang sama yaitu, kerjasama ini dibentuk berdasarkan alasan untuk membantu negara lain dalam hal perbaikan sanitasi dengan menggunakan standar tertentu yang sesuai dengan standar Jepang. Selain ingin mempengaruhi masyarakat internasional tentang pentingnya sanitasi, Jepang juga ingin menunjukkan bahwa negaranya memiliki pengalaman dan pengetahuan didalam bidang ini.

b.) 2nd Stage: Norm Cascade

Stage kedua dikarakteristikan sebagai imitasi dinamis dimana norma telah mengalir daan masa telah siap

mengadopsi norma baru karena adanya tekanan kesesuaian dan legitimasi internasional yang mengharuskan mereka menerima norma tersebut untuk menjaga eksistensinya di dunia internasional.

Poin ke 7 MDGs dan poin ke 6 SDGs merupakan bukti bahwa norma sanitasi telah mulai menjangkau persebaran yang lebih luas. Sejak diciptakannya MDGs pada tahun 2001 Jepang telah secara aktif berkontribusi untuk mencapai poin terkait sanitasi didalam MDGs yaitu poin ke 7 melalui pemberian ODA dan bantuan lainnya.

Di dalam perancangan SDGs sendiri, Jepang merupakan negara yang memiliki pengaruh didalam perumusan dan negosiasi poin-poin didalamnya. Jepang secara aktif berkontribusi pada diskusi poin-poin SDGs melalui berbagai peluang dialog di forum Majelis Umum PBB. Pada dialog kebijakan untuk merumuskan SDGs di Majelis Umum PBB yang diselenggarakan pada 2013 dihadiri oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dan Menteri luar negeri Kishida. Dalam proses negosiasi SDGs tersebut, Jepang melalui Shinzo Abe secara aktif memberikan kontribusi pada diskusi di bawah konsep *human security*, Jepang menyarankan poin-poin mengenai pembangunan yang melekat pada kepentingan Jepang yaitu pada bidang pendidikan, isu perempuan, kesehatan, infrastruktur berkualitas tinggi, DRR dll.

Jepang menjadi negara yang mengangkat isu tentang pentingnya kesehatan dan infrastruktur yang berkualitas tinggi, kesehatan dan infrastruktur dalam hal ini adalah mengenai ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik, Jepang secara domestik telah mewujudkannya dengan perbaikan infrastruktur dibidang sanitasi dengan menerapkan

standarisasi khusus untuk pengelolaan limbah dan toilet di negaranya. Peran aktif Jepang didalam perumusan poin SDGs ini merupakan usaha Jepang untuk meyakinkan dan mempengaruhi masa internasional bahwa sanitasi sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Namun dibalik itu semua, terdapat tujuan lain yang ingin dicapai Jepang yaitu untuk menyebarluaskan norma terkait sanitasi yang baik yang dimiliki negaranya sehingga norma tersebut dapat diadopsi bersama oleh negara lain dan menjadi norma internasional (Japan's efforts to mainstream the 2030 Agenda in national context).

Tidak hanya berperan aktif didalam perumusan poin SDGs, Jepang juga berkomitmen untuk melakukan segala upaya baik secara domestik maupun internasional untuk mencapai SDGs tersebut. Untuk itu, Jepang mendirikan sebuah *headquarter* SDGs yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, serta menyelenggarakan "Pertemuan *Roundtable* Promosi SDGs" sebagai kerangka kerja *multi-stakeholder* pada Mei 2016. *Headquarter* ini bekerja untuk merumuskan "Prinsip-prinsip Panduan Implementasi SDGs".

Pada *stage* ini, isu sanitasi mulai tersebar dan mulai diterima karena telah menjadi pembahasan didalam sebuah organisasi internasional yang lebih besar dan memiliki wewenang, yaitu PBB. Negara-negara cenderung memiliki rasa empati untuk mengadopsi isi ini karena adanya kecenderungan untuk mempertahankan reputasinya diranah internasional. MDGs dan SDGs menjadi media yang efektif bagi Jepang untuk menyebarluaskan isu sanitasi.

c.) 3rd Stage: Internalization

Stage ini adalah dimana norma telah dikenal dan diterima dengan baik,

sehingga norma akan mulai di dibakukan didalam suatu perjanjian atau hukum, oleh karena itu para pelaku regional atau internasional terikat oleh keharusan untuk mematuhi. Masa dan pemimpin negara cenderung tidak lagi mempertanyakan atau meragukan norma ini.. Dalam kata lain, pada *stage* ini norma telah menjadi suatu kebiasaan atau *habit*.

Dalam hal ini, legitimasi terkait sanitasi telah mencapai level yang lebih tinggi, isu sanitasi telah menjadi isu yang dibakukan didalam PBB. Salah satunya adalah *Human Right to Water and Sanitation*, HRWS telah diakui dalam hukum internasional melalui perjanjian hak asasi manusia, sehingga mengikat di bawah hukum internasional. Perjanjian lain yang secara eksplisit mengakui HRWS termasuk Konvensi 1979 tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan Konvensi 1989 pada hak anak.

Resolusi pertama mengenai HRWS disahkan oleh Majelis Umum PBB dan Dewan HAM PBB pada 2010. Mereka mengakui bahwa ada hak asasi manusia untuk sanitasi yang terhubung dengan hak asasi manusia terhadap air, karena kurangnya sanitasi mengurangi kualitas air, sehingga diskusi selanjutnya terus menekankan kepada hak dalam dua hal tersebut. HRWS mewajibkan pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati air dan sanitasi yang bersih, sesuai standar, dapat diakses dengan mudah dan terjangkau. HRWS mengharuskan negara penandatangan

untuk mencapai dan menghormati semua hak asasi manusia secara progresif, termasuk air dan sanitasi. Negara harus bekerja dengan cepat dan efisien untuk meningkatkan akses dan meningkatkan layanan terkait sanitasi (International Decade for Action "WATER FOR LIFE", n.d.).

Pembakuan isu sanitasi menjadi suatu hukum yang resmi menunjukkan bahwa usaha dan kerja *norm entrepreneur* telah berhasil, usaha Jepang pada level perencanaan poin-poin MDGs dan SDGs telah meningkat kepada pembakuan isu ini ditahap yang lebih tinggi yaitu oleh PBB. Isu sanitasi kini telah menjadi norma yang harus adopsi dan dipatuhi oleh negara-negara penandatangannya, karena konsep hukum yang menerapkan *reward* and *punishment* kepada negara yang tidak mematuhi.

Pada *stage* ini, norma sanitasi Jepang telah tersebar dan masyarakat internasional telah mengenal Jepang sebagai pelopor sistem sanitasi dunia, masyarakat internasional telah terkonstruksi bahwa Jepang adalah negara dengan sistem sanitasi yang baik sehingga ada kecenderungan untuk menjadikan Jepang sebagai contoh dalam bidang sanitasi. Terlebih karena telah banyak terbentuk suatu hukum yang membahas tentang sanitasi. Dalam kata lain, melalui usaha yang dilakukan pemerintah Jepang sebagai *norm entrepreneur*, Jepang telah berhasil menjadikan isu sanitasi sebagai norma internasional, yang mana Jepang merupakan *role-model* didalam norma sanitasi internasional ini.

DAFTAR PUSTAKA

- (t.thn.). Diambil kembali dari Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.web.id/sanitasi>
- (t.thn.). Diambil kembali dari Japan Sanitation Consortium:
<http://jsanic.org/aboutus/howwearex.html>
- (2014). Diambil kembali dari Ministry of Foreign Affairs of Japan :
<https://www.mofa.go.jp/policy/oda/sector/water/action.html>
- (2018). Diambil kembali dari International Water Association:
<https://worldwatercongress.org/2018-tokyo/>
- (2019). Diambil kembali dari Ministry of Health, Labour and Welfare:
https://www.mhlw.go.jp/english/policy/health/water_supply/1.html
- Adi, I., & Achwan, R. (2017). *Competition and Cooperation in Social and Political Sciences: Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities*. Depok: Routledge.
- Alexander Wendt, E. O. (2000). *Constructivism in International Relations*.
- Alexander Wendt, J. S. (2014). Dalam *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional (Perdebatan Paradigma dan Pendekatan Alternatif)* (hal. 54-55). Malang: Intrans Publishing .
- Astuti, K., & Ramadhan, B. (2016, Desember 08). *Ini Para Pemenang World Halal Tourism Awards 2016*. Diambil kembali dari Republika.co.id:
<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/12/08/ohtyo2330-ini-para-pemenang-world-halal-tourism-awards-2016>
- Azizah, N. (2016). *Pembentukan Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Afrika*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Baranay, P. (2009). *Modern Economic Diplomacy*. Latvia: Publications of Diplomatic Economic Club.
- Center, U. N. (t.thn.). *Press Statement, United Nations Independent Expert on the issue of human rights obligations related to access to safe drinking water and sanitation Ms. Catarina de Albuquerque - Mission to Japan*. Diambil kembali dari UN Special Rapporteur on the Human Right to Water and Sanitation: https://sr-watersanitation.ohchr.org/en/presstatement_japan.html
- CrescentRating, M. (2017). *Japan Muslim Travel Index (JMTI) 2017. A Mastercard-Crescentrating GMTI Series Report, 7-10*.
- DDHK News. (2013, December 10). *Nippon Asia Halal Association Bantu Warga Muslim Jepang Dapatkan Produk Halal*. Diambil kembali dari Dompot Dhuafa Hongkong:

<https://ddhongkong.org/nippon-asia-halal-association-bantu-warga-muslim-jepang-dapatkan-produk-halal/>

detikFood. (2013, Desember 09). *Nippon Asia Halal Association Bantu Warga Muslim Jepang Dapatkan Produk Halal*. Diambil kembali dari detik Food: <https://food.detik.com/info-halal/d-2436786/nippon-asia-halal-association-bantu-warga-muslim-jepang-dapatkan-produk-halal>

Development, U. A. (2003). *Clean Water for People Initiative: US-Japan Initiative*. Diambil kembali dari U.S Department of State : <https://2001-2009.state.gov/g/oes/rls/fs/2003/18965.htm>

Finemore, M. (1996). Dalam *National Interest in International Society* (hal. 22). Cornell University Press.

Friedrich, K. (1989). *Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs*. Cambridge: Cambridge University Press.

Goto-Jones, C. (2009). *Modern Japan: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.

Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teorii Hubungan Internasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Haryanto. (1982). *Sistem Politik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta.

India's Water and Sanitation Crisis. (t.thn.). Diambil kembali dari Water.org: <https://water.org/our-impact/india/>

Indonesia, P. S. (2015, 09 20). Diambil kembali dari Portal Sanitasi Indonesia: <http://www.sanitasi.or.id/?p=709>

International Decade for Action "WATER FOR LIFE". (t.thn.). Diambil kembali dari United Nation : https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

Japan announces a new ODA Initiative: "Water and Sanitation Broad Partnership Initiative" (WASABI). (t.thn.). Diambil kembali dari Ministry of Foreign Affairs of Japan : <https://www.mofa.go.jp/announce/announce/2006/3/0320.html>

Japan Tourism Agency. (2014). *White Paper on Tourism in Japan. The Tourism Situation in Fiscal Year 2013*, 11.

Japan, M. o. (2008). *Japan's Efforts towards the Achievement of the Millennium Development Goals*.

(t.thn.). *Japan's efforts to mainstream the 2030 Agenda in national context*.

- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2018, Juni 05). *Bebas Visa dengan Sistem Registrasi Pra-keberangkatan bagi Warga Negara Indonesia Pemegang e-paspor*. Diambil kembali dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia: https://www.id.emb-japan.go.jp/visa_waiver2018.html
- Koran Sindo. (2018, Desember 23). *Persaingan Wisata Halal Meningkat*. Diambil kembali dari Sindonews.com: <https://ekbis.sindonews.com/read/1365155/34/persaingan-wisata-halal-meningkat-1545534072>
- Krook, M. L. (2012). Rethinking the Life Cycle of International Norms. *European Journal of International Relations*, 103.
- Mas'ood, M., & MacAndrews, C. (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Media Islam. (2012, May 14). *Makanan yang Halal dan Baik (Halalan Thoyyiban)*. Diambil kembali dari Media Islam: <https://media-islam.or.id/2012/05/14/makanan-yang-halal-dan-baik-halalan-thoyyiban/>
- Merinda, M. F. (2018). *Best of Japan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2013, Juni 25). *Exemption of Visas for Nationals of Malaysia*. Diambil kembali dari Ministry of Foreign Affairs of Japan: https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000127.html
- Naomi Ellemers, R. S. (2002). Dalam *Self and Social Identity* (hal. 164-165). Annual Review of Psychology.
- Robert Jackson, G. S. (1999). Dalam *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. New York : Oxford University Press Inc.,.
- Rosyidin, M. (2015). Dalam *The Power of Ideas* (hal. 72-73). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sakamoto, T. (2018). *Japan-India Friendship: Activities of JICA in India*. Diambil kembali dari Japan International Cooperation Agency: https://www.jica.go.jp/india/english/office/others/c8h0vm00009ylo4c-att/presentations_20.pdf
- Sara E. Davies, J. T. (2017). Norm Entrepreneurship in Foreign Policy: William Hague and the Prevention of Sexual Violence in Conflict. 1.
- Saragih, H. P. (2018). *20 Negara dengan PDB Terbesar di Dunia*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180218140126-16-4654/20-negara-dengan-pdb-terbesar-di-dunia>
- Shindo, Y. (2015). Dalam *Mengenal Jepang* (hal. 2). Kompas.
- Shindo, Y. (2015). *Mengenal Jepang*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- Sunstein, C. R. (1996). Social Norms and Social Roles. *Columbia Law Review*, 903-968.
- Thomas Risse, K. S. (1999). Dalam *The socialization of international human rights norms into domestic practices: introduction* (hal. 6-7).
- Vidya Venkataramanan, J. C. (2018). Community-Led Total Sanitation: A Mixed-Methods Systematic Review of Evidence and Its Quality. *Environmental Health Perspective*.
- Wahidati, L., & Sarinastiti, E. N. (2018). PERKEMBANGAN WISATA HALAL DI JEPANG. *Journal Gama Societa, Vol. 1 No. 1*, 12.
- Waseda University. (2017, Agustus 25). *Ever growing Muslim community in the world and Japan*. Diambil kembali dari Waseda University: <https://www.waseda.jp/top/en/news/53405>
- Yusof, S., & Shutto, N. (2014). The Development of Halal Food Market in Japan : An Exploratory Study. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121, 253 – 261.